

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya digunakan untuk melihat pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam segi kehidupan organisasi pemerintahan maupun privasi.

Menurut *Cgarles O. Jones*, istilah kebijakan (*policy term*) dalam (Anggara, 2012) istilah ini biasanya digantikan dengan tujuan (*goals*), keputusan, proposal, program, dan graind desaign. Kebijakan ini dalam praktek sehari-hari digunakan untuk menggantikan dalam kegiatan atau keputusan yang berbeda.

Menurut pendapat *Thomas Dye* mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah upaya sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, alasan mengapa suatu kebijakan harus berguna bagi kehidupan bersama sehingga dapat menjadi pertimbangan yang menekankan dari kebijakan itu sendiri. Yang dapat bermakna besar bagi msyarakat dan tidak meghasilkan kerugian, oleh sebab itu pemerintah harus mengambil kebijakan yang bijaksana (Anggara, 2012).

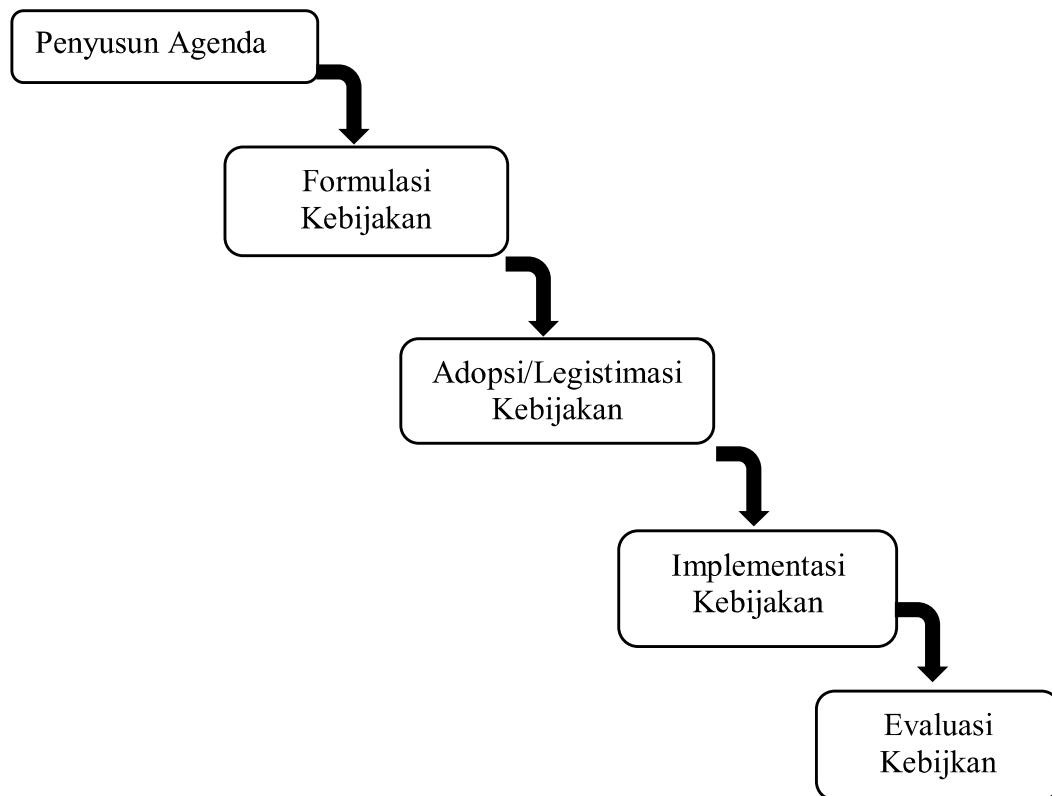
a. Ciri-ciri kebijakan publik

Menurut (Wahab, 2017: 20-24) Kebijakan publik pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan yang khusus dengan arti memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga tidak dimiliki oleh kebijakan jenis yang lainnya, antara lain:

- 1) Kebijakan publik, seperti kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan dalam sistem politik modern, kebijakan ini tidak asal-asalan melainkan kebijakan yang direncanakan. Kebijakan publik tersebut melakukan kegiatan yang dibuat dan dilakukan mengarah pada tujuan tertentu.
- 2) Pada dasarnya kebijakan terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan, tertuju pada tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Nyatanya kebijakan itu sendiri dilaksanakan oleh pemerintah di bagian-bagian tertentu.
- 4) Kebijakan publik tidak selalu berbentuk negatif, bisa juga berbentuk positif. Dalam bentuknya yang negatif, bisa seperti keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun dalam permasalahan yang ada, serta campur tangan dari pemerintah itu amat sangat diperlukan. Dalam bentuk yang positif, kebijakan publik mungkin bisa mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk berpengaruh pada penyelesaian masalah tertentu.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dalam (Anggara, 2014:172-173) Tahap-tahap dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Sumber: (Anggara, 2014:172)

1) Penyusunan Agenda

Merupakan suatu proses yang realitas dan strategis pada kebijakan publik. Sebuah Isu yang memperoleh status sebagai masalah dan menjadi prioritas dalam agenda publik, isu itu berhak ditempatkan pada tempat dalam sumber daya publik yang lebih dari pada isu lainnya. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah.

2) Formulasi Kebijakan

Isu yang sudah diterima dalam agenda kebijakan, kemudian dikaji oleh pembuat kebijakan. Isu-isu tersebut diartikan untuk memecahkan masalah yang

asalnya dari macam-macam alternatif. Pada tahap ini dicari suatu pemecahan isu tersebut.

3) Legitimasi Kebijakan

Bertujuan memberikan kewenangan pada proses dasar pemerintahan. Warga negara akan mengikuti kebijakan pemerintah guna untuk kedaulatan masyarakat. Warga negara juga harus yakin bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol-simbol tertentu dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Pada tahap inilah mencari solusi dalam pemecahan masalah yang sudah disepakati kemudian diimplementasikan. Penemuan-penemuan berbagai kendala sering terjadi dilapangan dan juga biasanya berbeda dengan tujuan dari kebijakan yang sudah dibuat. Maka dari itu haruslah mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.

5) Evaluasi Kebijakan

Pada dasarnya evaluasi kebijakan dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut penilain atau perbaikan dalam suatu adanya kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Winarno, 2016). Evaluasi juga dilihat sebagai suatu kegiatan fungsional. Yang mana tidak hanya dilakukan diawal saja namun juga diakhir dan semua porses yang menyangkut dengan kebijakan.

c. Jenis-jenis Kebijakan Publik

James E. Anderson (Anggara, 2012) adalah sebagai berikut:

1) *Substantive and procedural policies*

Kebijakan dipandang dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan dalam ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya disebut *Substantive policy*. Sedangkan *procedural policy* merupakan kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terkait dalam perumusannya (*policy stakeholders*). Contohnya: undang-undang mengenai pendidikan, yang bertanggungjawab membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional. Namun untuk membuatnya harus melibatkan banyak instansi-instansi baik swasta maupun dalam pemerintahan seperti guru, DPR, pegawai negeri dan lain sebagainya.

2) *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*

Distributive policy adalah suatu jenis yang kebijakan dalam pemberian pelayanan/keuntungan pada seseorang, kelompok individu, atau perusahaan. Contoh, kebijakan tentang *tax holiday*.

Redistributive policy adalah kebijakan tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. Contoh, kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Regulatory policy adalah peraturan yang berasal dari kebijakan tentang pembatasan/pelarangan terhadap tindakan-tindakan. Contoh: peraturan dilarang mempunyai senjata api.

3) *Material Policy*

Material policy adalah mengatur tentang kebijakan penyediaan sumber material yang nyata bagi penerimanya.

4) *Public Goods And Private Goods Policies*

Public goods policy adalah kebijakan yang menghimbau penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan kebijakan yang mengatur penyediaan pelayanan barang-barang oleh pihak swasta untuk kepentingan perorangan pada pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu disebut *Substantive policy*.

2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014) implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau pejabat-pejabat pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan kebijakan dari keputusan bersama.

Implementasi merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pembuat dari kebijakan itu dan berharap akan menghasilkan sasaran secara bersama. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yaitu studi implementasi kebijakan untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah kebijakan.

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

1) Menurut Edward III

Dalam model yang dikembangkannya, mengemukakan empat faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi yang saling terhubung.

Communication (komunikasi) merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan,

perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, informasi harus jelas, dan harus teliti juga konsistensi dalam menyampaikan informasi.

Resourcess (sumber daya) merupakan implementasi kebijakan yang memegang peranan yang sangat penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber untuk mendukungnya tidak ada. Sumber-sumber yang dituju adalah: staf-staf yang mencukupi jumlahnya dan mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan isi dari kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan dalam implementasi.

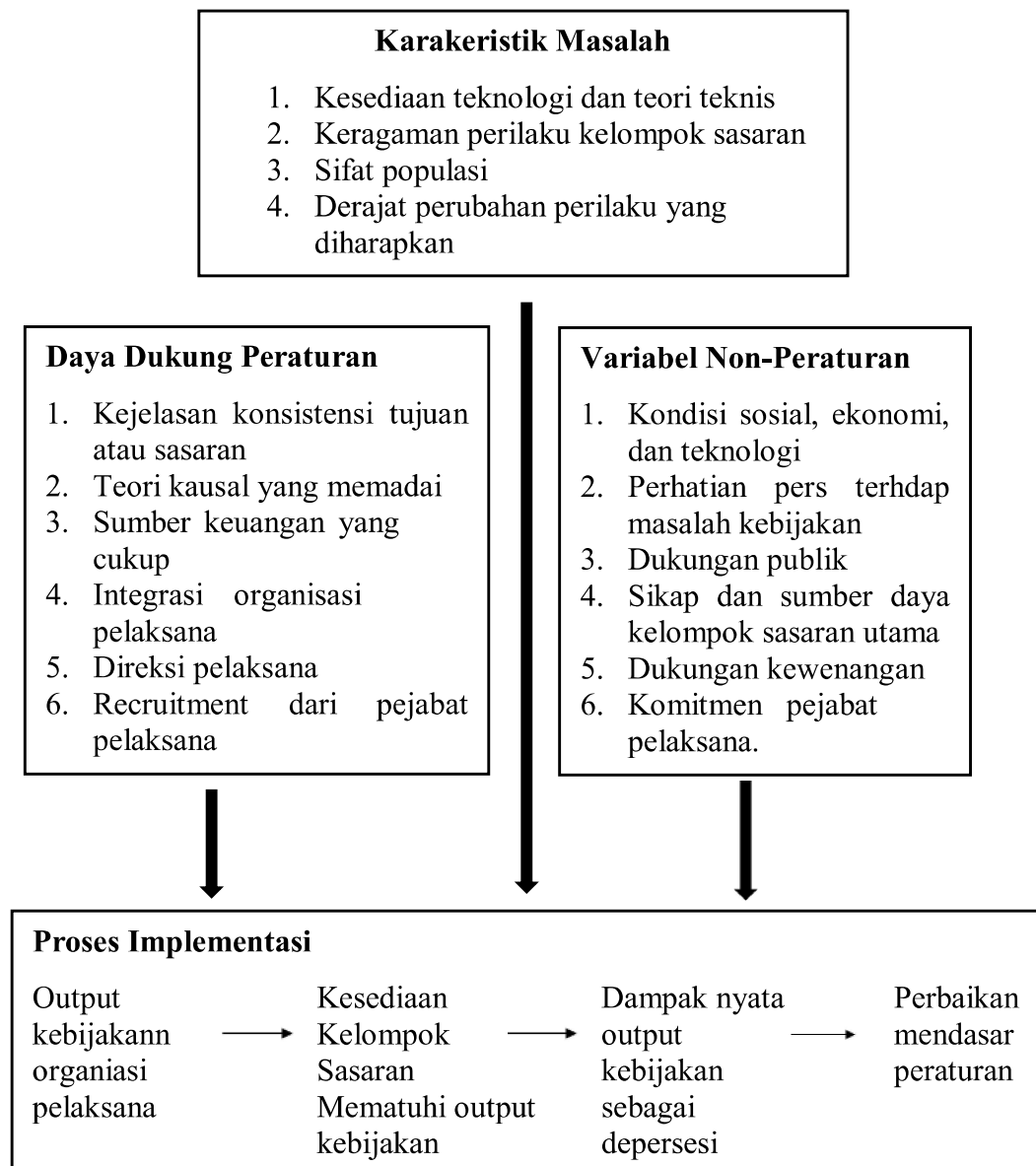
Dispotition or Attitude (sikap) berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Sering kali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.

Bureaucratic structure (struktur birokrasi) suatu kebijakan yang melibatkan beberapa instansi pada implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif untuk mencapai sasaran.

2) Menurut Mazmainan dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Anggara, 2014:257) ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi

Gambar 2.3.1 Impelementasi Kebijakan Mazmainan dan Sabatier



Sumber: (Anggara, 2014:258)

a. Karakteristik Masalah

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan.
- 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program relatif lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda.
- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan lebih sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan dari pada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b. Karakteristik Kebijakan

- 1) Kejelasan isi kebijakan. Artinya, substansi suatu kebijakan akan lebih jelas dan tepat, sehingga lebih mudah dipraktikkan di masyarakat. Ketidakjelasan isi kebijakan, di sisi lain, berpotensi menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi terdistorsi.

- 2) Ada kemungkinan bahwa kebijakan tersebut secara teoritis masuk akal. Meskipun setting sosial tertentu memerlukan penyesuaian, kebijakan dengan landasan teori memiliki karakter yang lebih stabil karena telah dicoba.
- 3) Ukuran sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan program sosial apa pun sangat penting. Setiap program juga memerlukan perekrutan orang untuk membantu tugas-tugas administratif dan teknis serta pemantauan program, yang semuanya mahal. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar-antara institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- 4) Pedoman lembaga pelaksana yang ada harus jelas dan konsisten.
- 5) Tingkat pengabdian aparatur terhadap tujuan kebijakan.
- 6) Dapat menentukan jumlah yang entitas luar memiliki akses ke implementasi kebijakan. Sebuah program yang memberikan berbagai kemungkinan bagi masyarakat untuk berpartisipasi menerima lebih banyak dukungan dari pada yang tidak. Jika masyarakat hanya menjadi pengamat program di daerahnya, mereka akan merasa terasing.

c. Lingkungan Kebijakan

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

- 2) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik.
- 3) Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara.
- 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

B. Indikator Implementasi Kebijakan

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014) proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat beberapa indikator sebagai berikut:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tingkat keberhasilan ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat praktis dengan kondisi sosial budaya pada tingkat pelaksana kebijakan dapat digunakan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan. Tidak mungkin terwujud bila

skala dan tujuan kebijakan terlalu ideal. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn percaya bahwa standar dan target tertentu harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan, dan bahwa kinerja kebijakan pada dasarnya adalah penilaian seberapa baik standar dan target ini terpenuhi.

2) Sumber daya

Kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Manusia adalah sumber daya yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara apolitis, setiap level implementasi memerlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Komunikasi

Individu harus memahami tujuan standar agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (pelaksana). Mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan harus mengkomunikasikan standar dan tujuan tersebut kepada para pelaksana. Komunikasi dari berbagai sumber informasi dalam rangka penyediaan informasi kepada pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi norma dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*). Standar dan tujuan kebijakan akan sulit dicapai jika tidak memiliki kejelasan, konsistensi, dan keseragaman.

4) Disposisi Atau Sikap

Sikap penerimaan atau penolakan para pelaksana kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang ada tidak dikembangkan oleh warga lokal yang akrab dengan masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Namun, kebijakan publik biasanya bersifat top-down, artinya pengambil keputusan mungkin tidak menyadari atau tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau masalah yang harus ditangani. Sikap mereka dipengaruhi oleh pendapat mereka tentang suatu kebijakan dan bagaimana mereka melihat dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan organisasi dan pribadi mereka.

Disposisi implementasi kebijakan, menurut Van Mater dan Van Horn, diawali dengan penyaringan terlebih dahulu melalui penilaian para pelaksana terhadap jumlah kebijakan yang diimplementasikan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

5) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Besarnya kontribusi lingkungan eksternal terhadap efektivitas kebijakan publik adalah faktor terakhir yang harus dievaluasi ketika mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan. Iklim sosial, ekonomi, dan politik yang buruk dapat menjadi sumber masalah kegagalan implementasi kebijakan. Akibatnya, upaya

untuk menerapkan kebijakan memerlukan lingkungan eksternal yang menguntungkan.

C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (Sunggoo, 2012:149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi Kebijakan.

Masih kurangnya ketidak jelasan dalam isi kebijakan yang dapat membuat kegagalan dalam kebijakan, karena apa yang seharusnya menjadi tujuan tidak cukup jelas dan tidak terurai secara terperinci juga program-program kebijakan terlalu umum atau bahkan sama sekali tidak ada. Kurangnya ketetapan dari dalam maupun luar dalam kebijakan yang akan lakukan. Hal lain juga yang menjadi penyebab yaitu kurangnya sumber daya atau sumber daya pembantu, contohnya, yang berkaitan dengan waktu, biaya dan tenaga manusia.

2) Informasi Implementasi

Kebijakan publik terlalu mengangap bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan informasi dalam komunikasi.

3) Dukungan.Pelaksanaan

Kebijakan publik akan sangat susah mencapai tujuan apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan dari berbagai pelaksana.

4) Pembagian Potensi.

Sebab serta akibat yang membuat tidak berhasilnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi pada para pelaku yang terlibat dalamnya. Dalam hal ini berhubungan dengan diferensiasi tugas dan wewenang pelaksananya. Struktur dalam organisasi dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang tidak sesuai dengan pembagian tugas.

2.1.3. Pelaksanaan Program Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Batam

Pelaksanaan program meliputi pelaksanaan operasi untuk mencapai tujuan program, yang meliputi: Tindakan preventif meliputi sosialisasi anak jalanan dan kerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan razia anak jalanan. Anak jalanan yang digerebek didaftarkan dan ditampung di rumah singgah, yang didirikan untuk merawat mereka yang terjebak dalam operasi tersebut. Pemberdayaan: Pemberdayaan ini dirancang untuk membantu anak-anak jalanan ini mengembangkan keterampilan yang akan memungkinkan mereka menemukan pekerjaan di masa depan. Hal inilah yang pada akhirnya akan membuat mereka tidak lagi menjadi anak jalanan.

Dinas Sosial telah membuat sistem pembinaan anak jalanan dalam rangka menekan jumlah anak jalanan dan menjadikan Kota Batam sebagai kota anak yang layak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial, salah satunya adalah dengan dibuatnya program pembinaan dan pendampingan oleh Dinas Sosial Kota Batam untuk mengatasi masalah anak jalanan di kota Batam. Pelatihan keterampilan dilakukan selain pelatihan mental.. (Batam Pos.co.id). Terkait kegiatan dalam pembinaan anak jalanan ini yang

diatur dalam Peraturan daerah kota Batam nomor 2 tahun 2016 dimana dalam kegiatan tersebut ada beberapa macam pembinaan yang harus didapatkan oleh anak jalanan dari Pemerintah Kota dan dilaksanakan oleh Dinas sosial Kota Batam yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Jasmani, yang meliputi olahraga, kesenian, dan pemeriksaan kesehatan. Untuk tetap dalam kondisi puncak, ia berusaha untuk kebugaran fisik dan kesehatan.
- 2) Pengembangan Keterampilan: Keterampilan yang diajarkan dimaksudkan untuk membantu siswa mengembangkan jiwa seni melalui musik atau kemampuan artistik seperti membuat produk yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Pembinaan Mental, yang bertujuan untuk membentuk pola sikap dan perilaku di kalangan anak nakal agar berdampak baik terhadap anak di bawah umur yang ditangkap saat razia.

A. Anak Jalanan

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak jalanan dalam konteks ini adalah anak yang berusia antara enam sampai dengan delapan belas tahun. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan bermain di jalanan. Karena dijatuhkan atau dicampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban akibat kemiskinan dan kehancuran keluarganya, anak jalanan hidup di jalanan. Pemulung, pemoles, dan pemulung sampah adalah

pekerjaan yang biasa dilakukan anak jalanan. Kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya terlalu umum. Anak jalanan lebih rentan terhadap praktik destruktif budaya jalanan, seperti seks bebas dan penyalahgunaan narkoba. (Armita, 2018)

Anak jalanan dapat didefinisikan sebagai anak-anak yang hidup di jalanan karena berbagai alasan untuk mencari nafkah dan mendapatkan uang. Jalanan menjadi ladang kehidupan, tempat pengalaman hidup, dan metode menemukan jawaban atas kesulitan ekonomi dan sosial bagi anak jalanan. Karena kehadiran mereka adalah salah satu ciri kehidupan perkotaan, terutama di kota-kota besar, hampir tidak ada kota tanpa mereka. Menjadi pengemis, mengoleksi barang bekas, dan berjualan koran di jalanan merupakan salah satu sektor informal pekerjaan anak jalanan saat ini dan mulai populer di kota-kota besar. Perkembangan dan permasalahan anak jalanan cukup marak seiring dengan dinamika pertumbuhan kehidupan ekonomi di lingkungan mereka berada. Pertumbuhan dan permasalahan anak jalanan sangat umum terjadi, begitu pula dinamika kehidupan ekonomi di lingkungan tempat mereka tinggal. Evolusi kehidupan anak jalanan di perkotaan, dan kehadirannya, tak lepas dari terciptanya kantong-kantong kemiskinan di sejumlah kota. Mereka mengemis kebutuhan sehari-hari di tempat umum, menjajakan koran dan berburu barang bekas untuk dijual sebagai sarana menghidupi diri dan keluarganya. Meskipun mereka adalah anak bangsa, negara telah menjamin mereka sebagai aset nasional, dan sumber daya manusia masa depan mereka juga aset keluarga, mereka telah mengabaikan hak mereka atas pendidikan dan pertumbuhan mental kebutuhan sehari-hari mereka

B. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi anak jalan, yaitu:

- 1) Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak
- 2) Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga
- 3) Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan
- 4) Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah
- 5) Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal/meningkat.
- 6) Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpuruk

C. Upaya Penanggulangan Anak Jalanan

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangan yaitu:

- 1) Upaya preventif adalah usaha untuk mencegah timbulnya anak jalanan di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok
- 2) Upaya reprensif adalah usaha-usaha yang terorganisir yang dimaksudkan untuk mengurangi atau meniadakan anak jalanan. Upaya tersebut meliputi: razia, penampungan sementara untuk diseleksi
- 3) Upaya rehabilitasi adalah usaha-usaha yang meliputi penampungan, seleksi, penyaluran, dan tindak lanjut, sehingga dengan demikian para anak jalanan kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia

2.2. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Koko Indra Kusuma, yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara yang dimuat pada Jurnal Administrasi Publik, Volume 2, Nomor 1, Juni 2014. ISSN: 2088-527x. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah No.4 tahun 2003, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan, dan perda ini dapat diterima di masyarakat. Pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi kepala daerah, kegiatan preventif memberi kesempatan kerja untuk masyarakat rentan, diberikan kesempatan untuk bekerja dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUBE), kegiatan

responsive agar gelandangan dan pengemis taat aturan dan perundang undangan dengan mempertimbangkan hak-hak nya sebagai manusia, dan kegiatan rehabilitasi melaksanakan razia pengemis dan gelandangan dan membawa ke panti sosial di kota Binjai yaitu UPT Pelayanan Sosial setelah diseleksi beberapa tahap dengan proses pertolongan dalam profesi pekerja sosial. (Kusuma, 2014)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Pas, Badrun Kartowargiran yang berjudul Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan yang dimuat pada Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi Volume 6, No.1, June 2018 (36-49). ISSN: 2502-1648 (online). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil Evaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 menunjukkan pemenuhan hak dan kebutuhan anak jalanan yang telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Sosial DIY. Hasil evaluasi ini terbukti dengan tidak ditemukannya kesenjangan yang besar antara program dan ketentuan yang dibuat pemerintah melalui Perda Nomor 6 Tahun 2011 (*standar*) dengan upaya pemenuhan hak dan kebutuhan anak jalanan (*performance*) yang diupayakan oleh perhatian Dinas Sosial kepada anak jalanan menjadi terfokus, sehingga assesmen yang di berikan kepada anak jalanan menjadi lebih efektif. Kedua, sebelum dikembalikan ke keluarga atau orang tua, Dinas Sosial harus benar-benar memastikan anak jalanan dalam keadaan siap untuk dikembalikan. Mengembalikan anak sebelum mendapatkan bimbingan yang mendalam membuka kemungkinan bagi anak

untuk kembali ke jalan. Hal ini dikarenakan belum adanya bimbingan atau pengarahan mendalam yang memberi kesadaran kepada anak untuk tidak lagi kembali ke jalan. Sebab pada kenyataannya, banyak anak yang kembali ke jalanan setelah dikembalikan ke orang tua atau daerah asalnya. Ketiga, bimbingan terhadap anak jalanan di RPS dan LKSA minimal 3 bulan sebelum dikembalikan ke orang tua. (Agustinus Pas, 2018)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ronawaty Anasiru, yang berjudul tentang Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Makassar yang dimuat pada Jurnal Administrasi Publik Sosiokonsepia Vol. 16 No. 02 Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam penanggulangan anak jalanan dilakukan menggunakan model pendekatan dari keluarga, panti asuhan, dan masyarakat. Faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah kurang tersediannya anggaran yang untuk mendukung keberhasilan program tersebut (Anasiru, 2017)
4. Penelitian yang dilakukan oleh Riko Riyanda yang berjudul tentang Kebijakan Program Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan (Kajian Kasus Di Beberapa Daerah). Yang dimuat pada Jurnal Dialektika Publik ISSN. 2528-3332. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan dan program anak jalanan di beberapa daerah di Indonesia merupakan persoalan yang dihadapi seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketimpangan pembangunan, akses pendidikan yang tidak adil di Kota Besar. Secara garis

besarnya dari permasalahan anak jalan di berbagai kota tersebut yang menjadi kunci pembinaan anak jalanan adalah adanya kemauan dari pemerintah dengan anggaran yang memadai dan program pembinaan pendidikan yang melahirkan skill dan keterampilan sehingga anak jalanan bukan lagi hidup di jalanan tapi memikirkan masa depan yang jauh lebih baik. (Riyanda, 2017)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dona Sari Kende, yang berjudul Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Yang dimuat pada jurnal Adminstrasi Publik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kota Batam sudah berjalan dengan cukup baik dengan adanya kegiatan pembinaan anak jalanan. Hal ini merupakan salah satu cara dalam menangani anak jalanan yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. Kegiatan pembinaan yang telah diatur di Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 mengenai Pembinaan Anak Jalanan, pengamen, Gelandangan, Pengemis yang dapat memberikan kemudahan kepada lembaga yang berwenang untuk memberikan pembinaan kepada anak jalanan, sikap petugas yang disiplin dan sigap dalam menanggapi pengaduan di masyarakat serta cepat dalam menjaring anak jalanan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ada dan berjalan efektif. Rendahnya kompetensi dan jumlah pegawai, kurangnya sarana seperti mobil truk patroli anak jalanan, dan rendahnya tingkat pemeliharaan investaris kantor serta kurangnya waktu penjangkauan terhadap anak jalanan. (Kende, 2019)

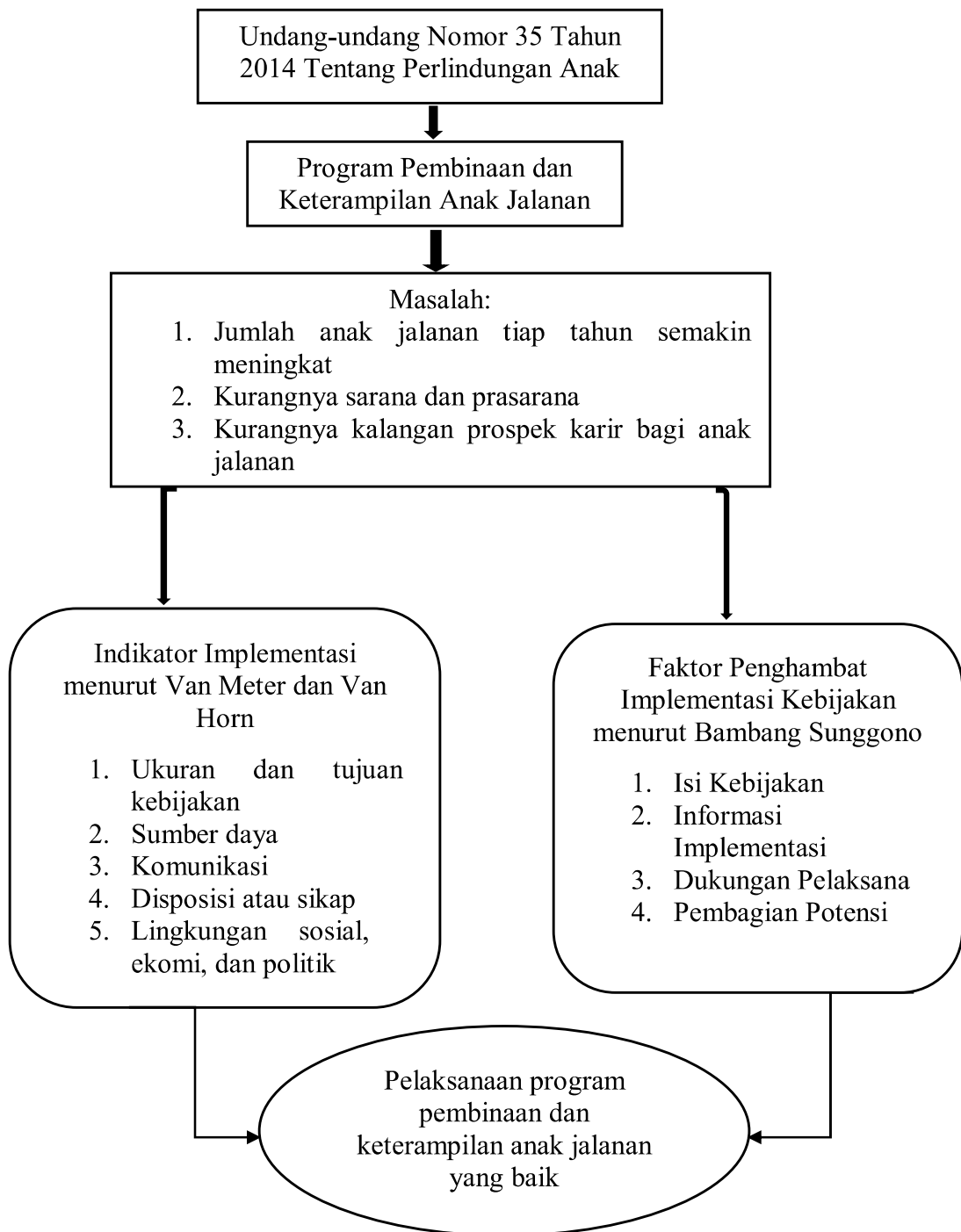
6. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina Astri, yang berjudul Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia, Faktor penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang. Yang dimuat pada jurnal Masalah-masalah Sosial Vol 5 Tahun 2014, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, adanya anak jalanan dilatarbelakangi dengan kemiskinan, penyimpangan kepribadian, dan beberapa faktor dari anak jalanan tersebut. Faktanya sebagian besar anak jalanan berasal darikeluarga miskin, hal inilah pemicu utama anak berada di jalanan. Dalam permasalahan anak jalanan inti dari masalah sebenarnya bukan hanya materi, tapi juga masalah pola pikir dan mental yang masih belum maju untuk dapat memikirkan visi kedepan yang lebih baik.(Astri, 2014)
7. Penelitian yang dilakukan oleh Erfinandus G.Setiawan dkk, yang berjudul tentang Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter “Griya Baca” Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak. Yang dimuat pada jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 1, Nomor 1, Tahun 2016, ISSN 2541-2515. Hasil dari penelitian ini adalah rumah singgah “Griya Baca” merupakan sebuah bentuk pelaksanaan yang dilaksanakan oleh sebuah badan profit. “Griya Baca” sendiri dimanfaatkan sebagai rumah singgah untuk pembinaan anak jalanan, dengan ini menegaskan bahwa segala perencanaan strategis terkait dengan kegiatan dan program selain program rutin, yang lebih dipengaruhi oleh faktor kondisional dan kebutuhan terkini para anak jalanan. Secara umum rumah singgah “Griya Baca” mempunyai rencana program yang sudah terdesain dalam visi misi dan program rutin tahunan. Namun dalam

pelaksanaanya terdapat beberapa program yang berjalan dan juga tidak, dikarenakan kurang adanya kerjasama terkait program yang telah direncanakan sehingga program tersebut tidak berjalan dengan semestinya.(Efrinandus G. setiawan, Catur Wahyudi, 2016)

8. Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Gumanti yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Di UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon). Yang dimuat pada jurnal Publik volume 8 Nomor 1 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Cirebon sudah dilaksanakan secara efektif tetapi belum sepenuhnya maksimal masih banyak yang harus di perbaiki lagi seperti sumber daya manusia yang masih kurang, komunikasi antara dinas dengan pihak sebenarnya juga masih kurang dan belum terlalu ketatnya penjagaan sehingga berpotensi memungkinkan anak tersebut kabur. (Gumanti, 2020)
9. Penelitian yang dilakukan oleh Lenny Husna, Dedi Epriadi yang berjudul Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah. Yang dimuat pada Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7 No. 4 Tahun 2020, ISSN 2354-9003. Hasil penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah dalam penanganan anak terlantar usia sekolah di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah melakukan kerjanya dengan pendataan, dan memberikan pelayanan sosial. Berdasarkan pasal 34 ayat 1

UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak terlantar atau miskin yang diasuh oleh negara belum efektif. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam seharusnya ada peningkatan program pelayanan untuk memaksimalkan kinerjanya. Masyarakat sendiri diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam menangani anak terlantar tersebut. (Dedi Epriadi, 2020)

2.3. Karangka Pemikiran



Gambar 2.3 Karangka Pemikiran

Sumber: Hasil Penelitian 2021